

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

1.1.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Todaro (2012) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara yang di bentuk dari capaian bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil yang di sesuaikan (Siska Damayanti, 2018, p. 12).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang didapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup yang layak (Alhudhori, 2017, p. 117).

Indeks pembangunan manusia merupakan alat yang digunakan untuk mengukur penilaian kualitas pembangunan manusia, dilihat dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun berdasarkan kondisi non fisik. Pembangunan dari kondisi fisik berdasarkan dari angka harapan hidup dan kemampuan daya beli, sedangkan pembangunan dari kondisi non fisik dapat dilihat dari kualitas pendidikan manusianya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (Al Muhairah et al., 2021).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak (Bakar, 2020, p. 20)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu konsep yang di perkenalkan pertama kali oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990, dimana konsep ini mencoba menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli. UNDP (The United Nations Development Programme) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memerhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup secara bebas (Murni & Mifka, 2016, p. 193).

Menurut United Nations Development Program (UNDP) , dalam indeks pembangunan manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

2.1.1.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

United national development programme (UNDP) di publikasi melaporkan bahwa pembangunan manusia sumberdaya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut human development indeks (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan manusia yang dirumuskan secara konstan diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna. Dimana indikator yang dipilih sebagai alat tolak ukur dimensi *human development indeks* (HDI) adalah sbb:

- a. *Longevity*, dapat diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi perseribu penduduk atau infant mortality rate.
- b. *Educational achievement*, diukur dengan dua indikator yaitu melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun keatas (*the mean years of schooling*)
- c. *Acces to resource*, diukur secara makro melalui PDB Rill perkapita dengan terminology purchasing power parity dalam dolar AS serta dilengkapi dengan tingkatan partisipasi angkatan kerja (UNDP Human Development Report, 2015, p. 97).

Angka Indeks Pembangunan Manusia berkisar antar 0 sampai 80. Semakin mendekati nilai 80, maka indeks pembangunan manusia diindikasikan semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, BPS membagi status pembangunan manusia suatu wilayah ke dalam empat golongan, yaitu:

1. $IPM < 60$: IPM Rendah
2. $60 < IPM < 70$: IPM Sedang
3. $70 < IPM < 80$: IPM Tinggi
4. $IPM \geq 80$: IPM Sangat Tinggi

Selanjutnya pengukuran IPM sendiri adalah untuk membandingkan kemajuan pembangunan manusia antar propinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia. Dalam indeks

pembangunan manusia terdapat tiga komposisi yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara. Menurut (Alhudhori, 2017, pp. 117–118) Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan manusia yaitu:

1. Komponen Kesehatan

Dalam indeks pembangunan manusia, komponen kesehatan ini tercermin dalam usia harapan hidup masyarakat yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.

2. Komponen Pendidikan

Dalam indeks pembangunan manusia komponen pendidikan diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah perbandingan antara Ketimpangan Pendapatan usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan Ketimpangan Pendapatan usia 15 tahun ke atas. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum adalah 0 (standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100% untuk semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (Standar UNDP).

3. Komponen Daya Beli

Dalam indeks pembangunan manusia komponen daya beli diwakili oleh pendapatan perkapita riil yang disesuaikan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang sudah di standarkan dengan mendeflasikan melalui indeks harga kosmen.

2.1.1.3 Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

- a. Indeks Harapan Hidup, adalah menunjukkan jumlah tahun hidup di harapan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sehat masyarakat.
- b. Indeks Hidup Layak, adalah untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli) UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan riil perkapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (Provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB perkapita karena PDRB perkapita hanya mengukur produktifitas wilayah dan tidak dapat mencerminkan daya beli riil masyarakat merupakan konsentrasi indeks pembangunan manusia.
- c. Indeks Pendidikan, adalah perhitungan Indeks Pembangunan Manusia mencakup indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Kedua indikator pendidikan dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka

LIT) dimana angka melek huruf merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan.

- d. Indeks Kependudukan, adalah kepadatan penduduk menjadi variabel bebas. untuk menjadi variabel kontrol, karena pemerintah daerah cenderung untuk melakukan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia pada daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sebaliknya daerah yang padat penduduk akan mengakibatkan pemenuhan jasa kesehatan dan pendidikan yang kurang baik tidak merata, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia.

2.1.1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

1. Untuk mengalihkan fokus para pengambilan keputusan, media dan non pemerintah dan penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dengan segenap kemampuan seharusnya menjadi criteria utama menilai pemabangunan manusia sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana negara dengan tingkat pendapatan perkapita sama dengan IPM yang berbeda.
3. Untuk memperlihatkan perbedaan diantara negara-negara, di provinsi- provinsi atau negara bagian diantara, gender, kesukuan dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan diantara kelompok-kelompok tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi faktor penting dalam ukuran kesuksesan pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia juga menjelaskan manusia memilih peluang untuk mengakses hasil dari proses pembangunan suatu wilayah, sebagai tanda bagian dari hak yang harus diterima pendapatan sesuai standar, pendidikan yang layak fasilitas

kesehatan yang memadai serta pemerataan kesejahteraan, berdasarkan kajian mengenai indeks pembangunan manusia menurut UNDP HDE untuk mengetahui indeks pembangunan manusia antara wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan (Melliana & Zain, 2013, p. 243)

2.1.2 Ketimpangan Pendapatan

2.1.2.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah.

Menurut (Sukirno, 2006) terdapat dua konsep mengenai pengukuran ketimpangan pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Riadi, 2020, p. 1). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Berikut definisi dan pengertian ketimpangan pendapatan dari beberapa sumber buku:

- Menurut (Michael P. Todaro, 2010) ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat.
- Menurut (Baldwin & Dianjung, 1986), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan.
- Menurut (Kuncoro, 2009), ketimpangan pendapatan adalah standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.
- Menurut (Sukirno, 2006), ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.

2.1.2.2. Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan dapat ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal di suatu negara. Ketimpangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini distribusi pendapatan akan memburuk, namun, di tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan dan ketimpangan akan terkikis, sehingga nantinya akan menciptakan masyarakat yang lebih setara (Nora Herlina et al., 2022, p. 28).

Menurut (Michael P. Todaro 2010), semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan

aggregate saving rate yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Permana, 2016, p. 118).

Terdapat delapan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*Capital Intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain (Damanik et al., 2018, p. 16).

2.1.2.3. Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam pengukuran ketimpangan pendapatan, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Distribusi ukuran (size distribution)

Menurut (Michael P. Todaro, 2010, p. 180), distribusi pendapatan perseorangan (personal distribution of income) atau distribusi ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.

Secara umum mengukur ketimpangan yang pertama dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk miskin. Selanjutnya dapat diukur dengan melakukan perbandingan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang kaya. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk miskin menerima diatas 17 persen pendapatan nasional.

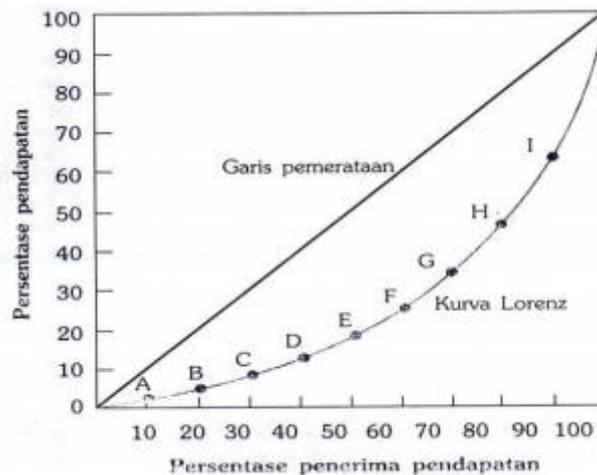
Menurut (Hudiyanto 2014) derajat ketimpangan pendapatan berdasarkan distribusi ukuran yaitu:

- **Tingkat ketimpangan berat**, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- **Tingkat ketimpangan sedang**, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- **Tingkat ketimpangan ringan**, apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional (Riadi, 2020, p. 4).

b. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan. Kurva lorenz dikenalkan oleh Conrad Lorenz, seorang ahli statistika dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva lorenz menggambarkan hubungan antara

kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan mereka. Kurva ini menggambarkan hubungan antara persentase Ketimpangan Pendapatan dengan persentase pendapatan yang diterima.



Gambar 2.1
Kurva Lorenz

Menurut (Michael P. Todaro, 2010, p. 223), kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selamanya, misalnya satu tahun. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.

Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, yang akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada suatu negarapun yang mengalami pemerataan sempurna atau

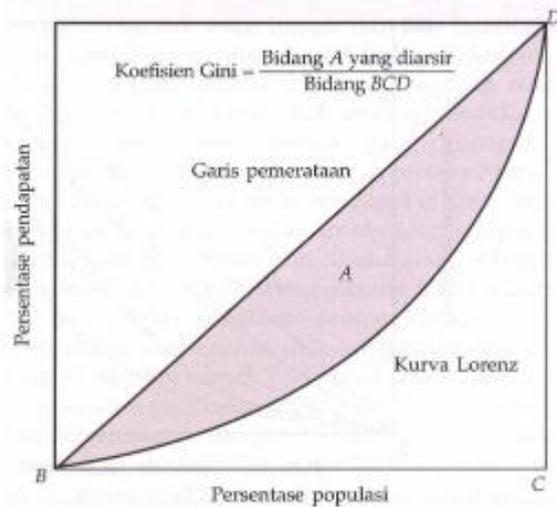
ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap negara terletak di sebelah kanan kurva diagonal. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan kurva Lorenz itu akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horizontal sebelah bawah (Riadi, 2020, p. 5)

c. Indeks Gini

Indeks gini dikenal juga dengan gini ratio (rasio gini) atau koefisien gini. Indeks gini diciptakan oleh Corrado Gini pada tahun 1912 dalam karyanya berjudul *Variabilità e mutabilità*. Indeks gini dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz, caranya adalah membandingkan atau membagi bidang yang dibatasi oleh garis regional dalam kurva Lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal. Angka yang didapat kemudian disebut indeks atau koefisien atau rasio gini. Indeks gini berkisar 0 dan 1. Gini sebesar 0 menunjukkan pemerataan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang persis sama. Sedangkan gini indeks 1 berarti ada ketidakmerataan yang sempurna (Michael P. Todaro, 2010, p. 226)

Indeks Gini juga dapat menunjukkan ketidaksetaraan melalui alat analisis rasio seperti pendapatan per kapita dan produk domestik bruto. Selain itu, Indeks Gini dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor dan negara. Indeks Gini dapat menunjukkan perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga mampu menunjukkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut.

Gambar kurva indeks gini beserta rumusnya adalah sebagai berikut:



$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan:

- G = Gini Ratio
- P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i
- Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i
- Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i
- k = Banyaknya kelas pendapatan

Gambar 2.2
Kurva dan Rumus Indeks Gini

Menurut (Michael P. Todaro, 2010, p. 226), indeks gini membagi tingkat ketimpangan pendapatan menjadi lima tingkat, yaitu:

1. Ketimpangan sangat tinggi (Rasio Gini = 0,8).
2. Ketimpangan tinggi (0,6-0,79).
3. Ketimpangan sedang (0,4-0,59).
4. Ketimpangan rendah (0,2-0,39).
5. Ketimpangan sangat rendah (<0,2).

d. Bank Dunia

Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan

dengan total pendapatan penduduk. Terdapat tiga klasifikasi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, yaitu:

1. Ketimpangan Tinggi. 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total pendapatan.
2. Ketimpangan Sedang. 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12%-17% dari total pendapatan.
3. Ketimpangan Rendah. 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan (Riadi, 2020, p. 4).

2.1.3. Kriminalitas

2.1.3.1. Definisi Kriminalitas

Menurut (Kartono, 2009) Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya (Putra et al., 2021, p. 124).

Kriminalitas berasal berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Seperti diartikan dalam kamus terjemahan bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. (Soesilo, 1995) menyatakan bahwa kejahatan adalah yang memiliki dua macam pengertiannya yaitu secara yuridis dan sosiologi. Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan

yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologis adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang.

Kriminalitas atau tindakan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing bagi kehidupan di masyarakat, karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk tindakan kejahatan.

Menurut (Kartono, 2009, p. 144) Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma asusila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)

Menurut (Eide et al., 2006, p. 249) tindakan kriminal akan dipilih jika manfaat yang diharapkan dari melakukan kejahatan melebihi biaya yang diharapkan, termasuk biaya dari setiap alternatif yang hilang. Sehingga model ekonomi dari perilaku kriminal mengasumsikan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan adalah hasil dari analisis biaya serta manfaat yang dilakukan individu secara sadar maupun tanpa sadar.

Menurut (Becker & Landes, 1974, p. 71). mengatakan bahwa “dalam ilmu ekonomi kriminalitas, individu yang melakukan tindakan kriminal cenderung disebabkan oleh faktor finansial untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dan cepat dibandingkan dengan berkerja pada sektor formal tanpa mempertimbangkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut”.

2.1.3.2. Teori Kriminalitas

Menurut (Becker & Landes, 1974, p. 6). dalam “*Crime and Punishment: An Economic Approach*”, ketimpangan pendapatan dan aset secara umum terkait kepada kriminalitas dengan berbagai alasan. Berbagai pendekatan dikemukakan oleh ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Para ekonom melalui inisiasi model *rational criminal activity* pada dasarnya berpendapat bahwa keputusan individu untuk menjadi kriminal atau tidak didasarkan kepada analisis *cost and benefit*.

Secara eksplisit, keputusan individu untuk melakukan kriminalitas berbasis kepada keinginannya untuk memenuhi level konsumsi yang telah ditargetkan. Jika seorang individu tidak dapat mencapai level konsumsi yang diinginkan melalui jalan legal, maka untuk memenuhinya individu tersebut berkemungkinan melakukan aktivitas kriminal. Para peneliti tersebut mendalilkan bahwa keputusan individu apakah menjadi atau tidak menjadi kriminal didasarkan pada target tingkat konsumsi yang dicita-citakan setiap individu untuk dicapainya.

Jika seseorang tidak dapat mencapai tingkat konsumsi yang diinginkan melalui jalur hukum, ia mungkin dapat melakukannya dengan terlibat dalam kegiatan kriminal. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan relatif kelompok kaya dibandingkan yang miskin akan menyebabkan distribusi pendapatan lebih tidak merata dan akan meningkatkan tingkat kriminal. Secara implisit, teori ini juga menyatakan bahwa area dengan proporsi kemiskinan (penduduk miskin) dan ketimpangan pendapatan yang besar merupakan area komunitas asal kriminal dengan mendasarkan asumsi-asumsi penelitian.

2.1.3.3. Klasifikasi Kriminalitas

Klasifikasi kriminalitas telah dijelaskan kemudian, terdapat bentuk- bentuk tindakan kriminalitas. Tindakan kriminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma

sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Bentuk- bentuk tindakan kriminal menurut BPS antara lain:

Tabel 2.1
Bentuk-Bentuk Tindakan Kejahatan

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap fisik/ badan	Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap kesusilaan	Perkosaan Pencabulan
4	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	Penculikan Mempekerjakan anak dibawah umur
5	Kejahatan terhadap hak/ barang dengan penggunaan kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Pencurian menggunakan senjata api Pencurian menggunakan senjata tajam
6	Kejahatan terhadap hak milik/ barang	Pencurian Pencurian dengan pemberatan Pengrusakan/ penghancuran barang Pembakaran dengan sengaja Penadahan
7	Kejahatan terkait narkoba	Narkoba dan Psikotropika
8	Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi	Penipuan/ perbuatan curang Penggelapan Korupsi

Sumber: (BPS, 2023).

2.1.3.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kriminalitas

Menurut Kansil (1994), Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut: motivasi intrinsik (faktor intern), meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau

memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan. Motivasi ekstrinsik (faktor ekstern), meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

- a. Kemiskinan Menurut (Kartono, 2009), kemiskinan kronis tanpa jalan keluar mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan.
- b. Pengangguran Menurut catatan Statistika Indonesia (2013), besarnya jumlah angka pengangguran mempunyai pengaruh sosial yang luas karena mereka tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan. Maka semakin tinggi jumlah angka pengangguran semakin tinggi pula tingkat kerawanan sosial yang ditimbulkan, contohnya kriminalitas.
- c. Jumlah Penduduk Menurut Enrico Ferri dalam buku “Patologi Sosial” oleh Kartono (2009), menyebutkan bahwa salah satu penyebab kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kepadatan penduduk.
- d. Pendidikan Menurut Kansil (1994), bahwa tindakan kriminal salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Karena pendidikan merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia.
- e. Moral Menurut Kartono (2009), tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum.

2.2 Hubungan Antara Variabel Bebas (X) dengan Variabel Terikat (Y)

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kriminalitas.

Kriminalitas merupakan semua bentuk perbuatan yang memberikan dampak negatif secara ekonomi maupun psikologi serta bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum negara, norma sosial maupun agama. Kejahatan atau kriminalitas adalah perbuatan yang

bertentangan dengan norma hukum sehingga patut dimaknai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan (Kartono, 2009).

Simadjuntak (1981) menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kriminalitas, diantaranya dilihat dari pendekatan faktor demografik (peningkatan Ketimpangan Pendapatan), faktor ekologis (persebaran lahan pemukiman), faktor geografik (suhu udara, kelembaban, perubahan iklim), faktor ekonomi (kemiskinan dan pengangguran) dan faktor sosial (pendidikan, politik, dan agama) termasuk dalam itu semua adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Dermawanti et al., 2015, p. 247).

Kriminalitas berdampak terhadap banyak sektor. Kriminalitas mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun (Mauro & Carmeci, 2007). Faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas salah satunya adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM menunjukkan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan mengingat IPM terdiri dari 3 dimensi utama yakni Kesehatan, Pendidikan, dan Pendapatan.

Febriani (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kriminalitas. Usaha meningkatkan nilai IPM adalah salah satu strategi yang dapat dijalankan untuk mengurangi angka kriminalitas. Peningkatan IPM mengindikasikan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik terlihat dari pekerjaan yang baik juga. Pekerjaan yang baik memunculkan pendapatan yang tinggi. Dampak selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan dan turunnya angka kriminalitas.

2.2.2 Hubungan Ketimpangan Pendapatan dengan Kriminalitas.

Pendekatan ekonomi untuk mempelajari aktivitas kriminal telah memberikan wawasan penting dalam ranah kejahatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kejahatan dan perilaku ekonomi. Polarisasi pendapatan dapat menyebabkan segregasi sosial

dan imobilitas pendapatan, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, keresahan, dan konflik antar individu.

Ketidaksetaraan pendapatan dan kesejahteraan dapat menantang stabilitas dan kohesi sosial. Pendapatan rendah, pendidikan yang tidak memadai, pengangguran yang tinggi, dan perbedaan kelas sosial dapat memicu tindakan kriminal. Beberapa studi dalam sosiologi medis telah mengidentifikasi bahwa status sosial ekonomi individu dapat menjelaskan adanya perilaku kriminal. Kejahatan mempengaruhi baik negara maju maupun negara berkembang.

Sebuah studi klasik dari Ehrlich (1973) berpendapat bahwa ketidaksetaraan menyebabkan kejahatan karena imbalan dari pekerjaan yang jujur lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan jika seorang penjahat berhasil melakukan kejahatan. Di negara-negara seperti Meksiko, kenaikan 1% dalam ketimpangan pendapatan (indeks Gini) terkait dengan peningkatan >10 pembunuhan (per 100.000 penduduk). Di Indonesia, beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa peningkatan disparitas pendapatan, salah sasaran pada program sosial, dan akses layanan publik yang tidak merata memicu kejahatan yang lebih tinggi.

Hubungan antar kondisi kemiskinan dan kejahatan (properti dan pencurian motor) juga telah diidentifikasi dalam beberapa penelitian, dengan alasan bahwa faktor ekonomi dapat berpengaruh pada kejadian kejahatan. Penelitian tentang kriminalitas di Indonesia cenderung mendukung bahwa kesenjangan kesejahteraan dapat dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kegiatan kriminal dan kekerasan. Para peneliti di Universitas Airlangga mengusulkan sebuah model untuk memeriksa apakah penurunan distribusi pendapatan telah mengakibatkan aktivitas kriminal yang lebih besar di negara ini.

Berbagai jenis kegiatan kriminal diperiksa, dan sejumlah variabel sosial ekonomi yang dapat membantu menjelaskan kejahatan dari perspektif sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memperburuk aktivitas

kriminal di Indonesia (Sugiharti, Lilik, Miguel A. Esquivias, Mohd S. Shaari, Lussi Agustin, 2022) .

Menurut (Becker & Landes, 1974, p. 15) Peningkatan pendapatan relatif kelompok kaya dibandingkan yang miskin akan menyebabkan distribusi pendapatan lebih tidak merata dan akan meningkatkan tingkat kriminal. Secara implisit, teori ini juga menyatakan bahwa area dengan proporsi kemiskinan (penduduk miskin) dan ketimpangan pendapatan yang besar merupakan area komunitas asal kriminal.

2.3. Penelitian Sebelumnya

Edwart dan Azhar (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia”. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu menggunakan 31 Provinsi di Indonesia dengan pendekatan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. (2) Kepadatan Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. (3) Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

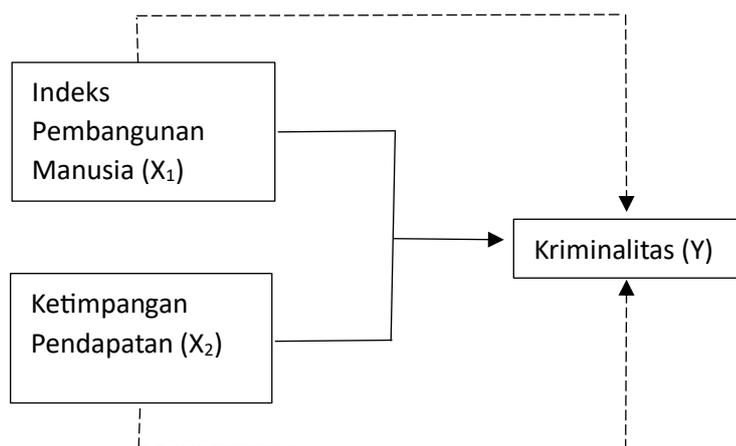
Ardelia (2023) meneliti tentang “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kriminalitas di Kalimantan Barat Dalam Kerangka Ekonomi Islam” Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun 2010 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik untuk estimasi pada penelitian ini yaitu Fixed Effect Model (FEM). Pengaruh antara IPM terhadap tingkat kriminalitas menunjukkan pengaruh negatif signifikan yang artinya semakin tinggi IPM maka tingkat kriminalitas semakin rendah begitu juga sebaliknya.

Audey dan Ariusni (2019) Melakukan Penelitian Tentang “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Indonesia” Jenis data adalah data sekunder.

Penelitian ini menggunakan data panel dengan 31 provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. (2) Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. (3) Kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas (4) Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks pembangunan manusia, pengangguran dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan kerangka pemikiran yang bertitik tolak dari latar belakang masalah. Masalah yang diambil tersebut kemudian disajikan dalam bentuk judul yang memiliki dua variabel yang mempengaruhi yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Ketimpangan Pendapatan (X_2) serta satu variabel yang dipengaruhi yaitu Kriminalitas (Y). Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Menurut (Kuncoro, 2009) hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh signifikan Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Ketimpangan Pendapatan (X_2) terhadap Kriminalitas (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022 baik secara parsial maupun simultan.